

LAPORAN KINERJA

Triwulan II Tahun 2026

**BALAI
PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA IV**

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sumatera IV

Sosialisasi Budaya Sadar
Resiko Keuangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Triwulan II Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV Tahun Anggaran 2026 dengan baik.

Dokumen Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memuat Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Target Kinerja, Capaian Target, Permasalahan atau Potensi Capaian Triwulan BP3KP Sumatera IV serta rencana tindak lanjut atas permasalahan pada triwulan sebelumnya. Laporan Kinerja Triwulan yang disusun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV menggambarkan capaian terhadap 5 (lima) Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Hasil dari Laporan Kinerja Triwulan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV ini selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas tersajinya laporan ini. Untuk semua masukan dan koreksi akan kami jadikan perbaikan dalam penyusunan laporan pada periode selanjutnya.

Jambi, 01 Juli 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera IV



YENNI Sofyan Mora, S.T., M.Si
NIP. 19810421 200812 2 002

Kepala Balai P3KP Sumatera IV
YENNI SOFYAN MORA, S.T., M.SI.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tugas Dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
BAB II CAPAIAN KINERJA	7
2.1 Target Kinerja TW I / II / III/ IV	7
2.1.1 Target Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal	8
2.1.2 Target Kinerja DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman	9
2.1.3 Target Kinerja DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan	11
2.1.4 Target Kinerja DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan	15
2.1.5 Target Kinerja DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	20
2.2 Metode Pengukuran Kinerja	21
2.3 Capaian Target Triwulan II	22
2.3.1 Capaian Target TW- II DIPA Sekretariat Jenderal	22
2.3.2 Capaian Target TW- II DIPA Ditjen Kawasan Permukiman	23
2.3.3 Capaian Target TW- II DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan	25
2.3.4 Capaian Target TW- II DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan	27
2.3.5 Capaian Target TW- II DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	29
2.4 Permasalahan / Faktor Keberhasilan	30
BAB III PENUTUP	36
3.1 RENCANA TINDAK LANJUT	36
LAMPIRAN	vii

DAFTAR TABEL

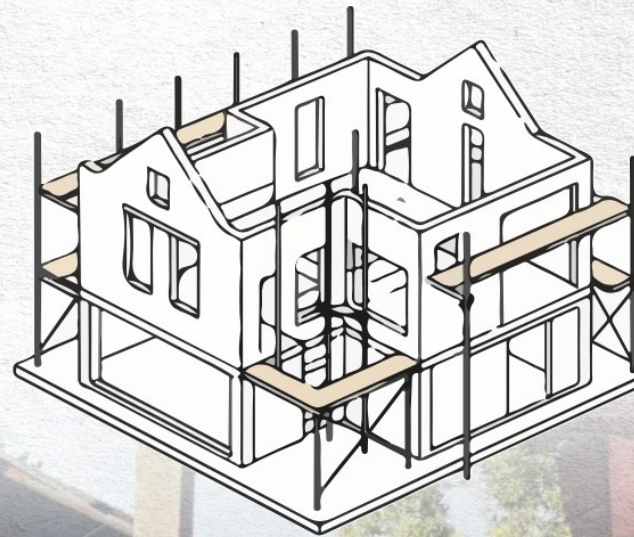
Tabel 1.3. 1 Struktur Organisasi dan Tugas Jabatan	5
Tabel 2. 1 Daftar Kode Satker	7
Tabel 2.1.1. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Sekretariat Jenderal)	8
Tabel 2.1.1. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Sekretariat Jenderal)	9
Tabel 2.1.2. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Kawasan Permukiman)	9
Tabel 2.1.2. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Kawasan Permukiman)	10
Tabel 2.1.3. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Perumahan Perdesaan)	12
Tabel 2.1.3. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Perumahan Perdesaan)	13
Tabel 2.1.4. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Perumahan Perkotaan)	15
Tabel 2.1.4. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Perumahan Perkotaan)	17
Tabel 2.1.5. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)	20
Tabel 2.1.5. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)	21
Tabel 2.3.1. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Sekretariat Jenderal	22
Tabel 2.3.2. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Kawasan Permukiman	23
Tabel 2.3.3. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Perumahan Perdesaan	25
Tabel 2.3.4. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Perumahan Perkotaan	27
Tabel 2.3.5. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen TKPR	29
Tabel 2.4. 1 Permasalahan BP3KP Sumatera IV pada Triwulan II	30
Tabel 3.1. 1 Rencana Tindak Lanjut BP3KP Sumatera IV pada Triwulan II	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi Lama	4
Gambar 1.3. 2 Struktur Organisasi Baru.....	4

BAB I

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan instansi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai panduan dan aturan yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.

Laporan Kinerja Triwulan menyajikan ringkasan pencapaian Kinerja entitas Akuntabilitas Kinerja dalam kurun waktu tiga bulan dari 5 (Lima) DIPA yang terdapat pada BP3KP Sumatera IV yaitu DIPA Sekretaris Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Laporan Kinerja Triwulan disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Laporan Kinerja Triwulan mencakup tentang:

1. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja Triwulan;
2. Capaian (realisasi) target Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Triwulan;
3. Deviasi antara target dan realisasi kinerja serta alternatif solusi;
4. Permasalahan, tindak lanjut, dan bukti tindak lanjut; dan
5. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran.

Capaian target kinerja pada Laporan Kinerja Triwulan digunakan sebagai masukan dalam penetapan capaian kinerja organisasi dan digunakan sebagai dasar perhitungan kinerja periodik pegawai.

1.2 Tugas Dan Fungsi

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset. Dalam menjalankan tugasnya BP3KP Sumatera IV menjalankan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi UPT, dalam hal ini Balai, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Tata Usaha;
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah I;
- c. Seksi Pelaksanaan Wilayah II; dan
- d. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

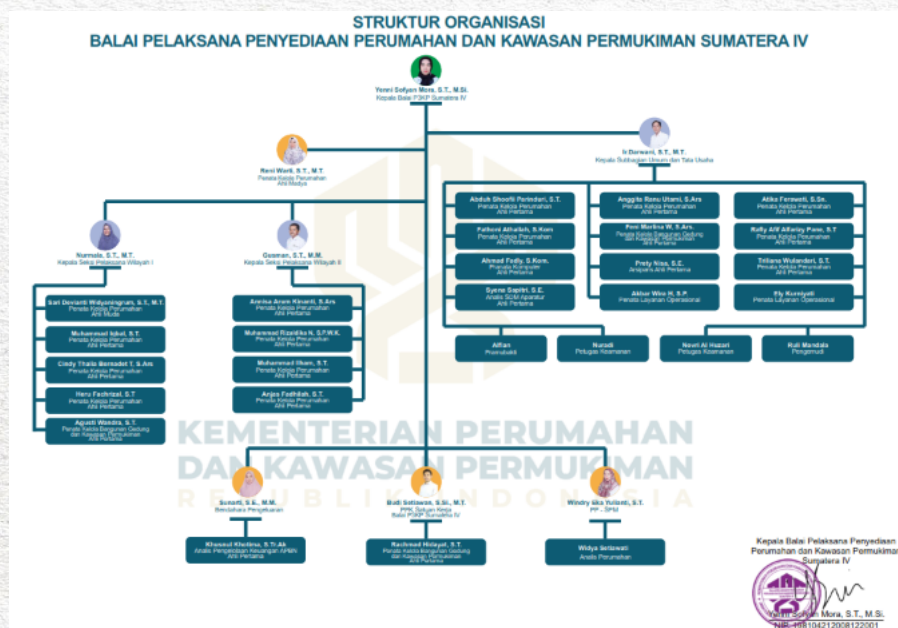
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Nomor 71/KPTS/Dd/2026 Tanggal 7 Mei 2026 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan Pejabat Perbendaharaan Lainnya pada Satuan kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, terjadi perubahan Struktur Organisasi pada BP3KP Sumatera IV.

Semula:



Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi Lama

Menjadi:



Gambar 1.3. 2 Struktur Organisasi Baru

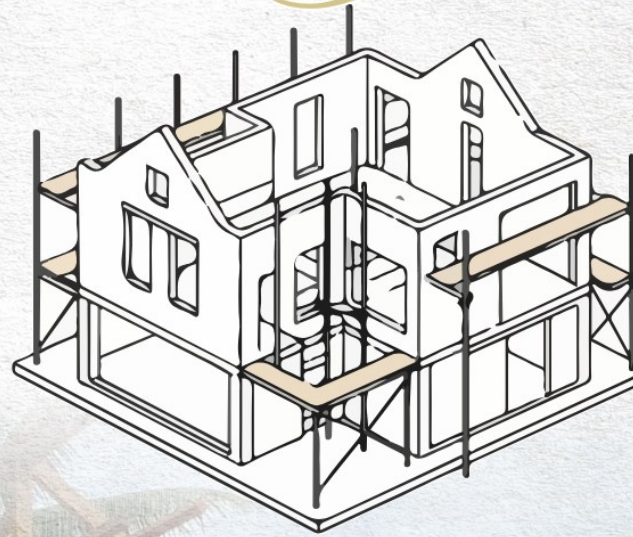
Struktur Organisasi dan Tugas Jabatan pada BP3KP Sumatera IV yaitu:

Tabel 1.3. 1 Struktur Organisasi dan Tugas Jabatan

No.	Jabatan	Tugas
1	Kepala Balai	a. Penanggung jawab utama atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP di wilayah kerja Sumatera IV.
2	Subbagian Umum dan Tata Usaha	a. Melakukan penyusunan program dan anggaran, b. Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, c. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, d. Melakukan pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, e. Melakukan koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.
3	Seksi Pelaksanaan Wilayah I	a. Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial; dan b. Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
4	Seksi Pelaksanaan Wilayah II	Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
5	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

BAB II

Perencanaan Kerja



BAB II

CAPAIAN KINERJA

Tahun 2026 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memiliki 5 (lima) DIPA yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sedangkan Satker PKP Provinsi Bengkulu dan Satker PKP Provinsi Jambi memiliki 4 (empat) DIPA yang sama dengan Balai kecuali DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Rincian Kode Satker tiap DIPA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Kode Satker

BALAI / SATKER	KODE SATKER / DIPA				
	SEKJEN	DITJEN KP	DITJEN PERDESAAN	DITJEN PERKOTAAN	DITJEN TKPR
BP3KP SUMATERA IV	691387	691441	691495	691549	691598
SATKER PKP PROVINSI BENGKULU	691389	691443	691497	691551	
SATKER PKP PROVINSI JAMBI	691388	691442	691496	691550	

Sumber: Analisis BP3KP Sum IV

2.1 Target Kinerja TW I / II / III/ IV

Target Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Aksi Revisi Tahun 2026 merupakan gabungan target kinerja untuk BP3KP Sumatera IV, Satker PKP Provinsi Bengkulu dan Satker PKP Provinsi Jambi yang di dalamnya Target Kinerja terhadap 5 (Lima) DIPA Unit Organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Terdapat perubahan pada Target Kinerja BP3KP Sumatera IV di Triwulan I dan Triwulan II dikarenakan terjadi revisi DIPA untuk masing-masing UNOR yang mengakibatkan perubahan Rencana Penarikan Dana. Berikut penjelasan mengenai Target Kinerja Tahun 2026:

2.1.1 Target Kinerja DIPA Sekretariat Jenderal

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Sekretariat Jenderal di Triwulan II Tahun 2026 merujuk pada Rencana Penarikan Dana dari hasil POK Revisi 5 DIPA Sekretariat Jenderal pada tanggal 11 Mei 2026, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Semula:

Tabel 2.1.1. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Sekretariat Jenderal)

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
UNOR : SEKRETARIAT JENDERAL										
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						2.000.191	26,47%	57,42%	75,98%	99,06%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	69.798	89,61%	91,32%	92,82%	98,18%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	35.994	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	14.960	60,00%	68,00%	75,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	18.844	93,26%	93,26%	93,26%	93,26%
IKK : Jumlah Layanan Perkantoran										
2	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	3	1.722.316	24,09%	50,91%	72,40%	98,98%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	899.299	12,01%	46,65%	73,82%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	438.808	28,00%	49,53%	64,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	384.209	47,91%	62,44%	78,67%	95,45%
IKK : Jumlah Layanan Sarana Internal										
3	KRO	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
	RO	EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	42	208.077	24,99%	99,99%	99,99%	99,99%
			Balai P3KP Sumatera IV	Unit	40	104.039	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1	52.019	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	1	52.019	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%

Menjadi:

Tabel 2.1.1. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Sekretariat Jenderal)

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
UNOR : SEKRETARIAT JENDERAL						2.000.191	26,47%	57,42%	75,98%	99,06%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						2.000.191	26,47%	57,42%	75,98%	99,06%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	69.798	89,61%	91,32%	92,82%	98,18%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	35.994	96,79%	96,79%	96,69%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	14.960	60,00%	68,00%	75,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	18.844	93,26%	93,26%	93,26%	93,26%
IKK : Jumlah Layanan Perkantoran										
2	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	3	1.722.316	24,09%	50,91%	72,40%	98,98%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	899.299	9,15%	38,65%	70,11%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	438.808	28,00%	49,53%	64,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	384.209	47,91%	62,44%	78,67%	95,45%
IKK : Jumlah Layanan Sarana Internal										
3	KRO	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
	RO	EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	42	208.077	24,99%	99,99%	99,99%	99,99%
			Balai P3KP Sumatera IV	Unit	40	104.039	0,00%	91,35%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1	52.019	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	1	52.019	99,96%	99,96%	99,96%	99,96%

2.1.2 Target Kinerja DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman di Triwulan II Tahun 2026 merujuk pada Rencana Penarikan Dana dari hasil POK Revisi 6 DIPA Ditjen Kawasan Permukiman pada tanggal 11 Mei 2026, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Semula:

Tabel 2.1.2. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Kawasan Permukiman)

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO	Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
					TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				40.630.019	0,58%	38,38%	78,79%	100%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				40.496.027	0,51%	38,38%	78,79%	100%
SK : Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni								

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.BMA	Data dan Informasi Publik							
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	27.822	23,00%	23,00%	89,89%	100%
		Balai P3KP Sumatera IV		Layanan	1	27.822	23,00%	23,00%	89,89%	100%
IKK : Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	PBF.001	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	107.389	0,00%	0,00%	9,13%	100%
		Balai P3KP Sumatera IV		Dokumen	1	107.389	0,00%	0,00%	9,13%	100%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis							
	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	122.013	21,01%	41,83%	62,64%	100%
		Balai P3KP Sumatera IV		Dokumen	1	122.013	21,01%	41,83%	62,64%	100%
IKK : Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas										
1	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis							
	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Unit	1.800	40.238.803	0,43%	38,49%	79,02%	100%
		Satker PKP Prov. Bengkulu		Unit	1.500	33.571.298	0%	27,66%	75,53%	100%
		Satker PKP Prov. Jambi		Unit	300	6.667.505	0%	93%	97%	100%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						133.992	20,66%	36,98%	78,57%	100%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	113.828	24,33%	43,53%	80,19%	100%
		Balai P3KP Sumatera IV		Layanan	1	32.677	31,46%	31,46%	95,08%	100%
		Satker PKP Prov. Bengkulu		Layanan	1	45.812	38,00%	60,00%	80,00%	100%
		Satker PKP Prov. Jambi		Layanan	1	35.339	0,00%	33,33%	66,67%	100%
	RO	EBA.963	Jumlah Data dan Informasi	Layanan	1	6.164	0%	0%	0%	100%
		Balai P3KP Sumatera IV		Layanan	1	6.164	0%	0%	0%	100%
	RO	EBA.956	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	14.000	0%	0%	100%	100%
		Balai P3KP Sumatera IV		Layanan	1	14.000	0%	0%	100%	100%

Menjadi:

Tabel 2.1.2. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Kawasan Permukiman)

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO	Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
					TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				40.514.293	0,57%	38,57%	79,00%	100,00%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				40.412.139	0,52%	38,54%	79,00%	100,00%
SK : Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penvediaan rumah layak huni								

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.BMA	Data dan Informasi Publik							
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	15.827	42,26%	99,12%	99,12%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	15.827	42,26%	99,12%	99,12%	100%
IKK : Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	PBF.001	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	61.103	0,00%	38,94%	73,02%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	61.103	0,00%	38,94%	73,02%	100%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis							
	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	96.406	27,88%	49,02%	73,36%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	96.406	27,88%	49,02%	73,36%	100%
IKK : Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas										
1	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis							
	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Unit	1.800	40.238.803	0,43%	38,49%	79,02%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1.500	33.571.298	0%	27,66%	75,53%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	300	6.667.505	0%	93,00%	96,58%	100%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						102.154	22,14%	50,92%	76,11%	100%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	94.508	23,93%	53,60%	75,76%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	13.357	39,02%	85,28%	85,28%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	45.812	38,00%	60,00%	80,00%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	35.339	0,00%	33,33%	66,67%	100%
	RO	EBA.963	Jumlah Data dan Informasi	Layanan	1	1.657	0%	82,08%	82,08%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	1.657	0%	82,08%	82,08%	100%
	RO	EBA.956	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	5.989	0%	0%	79,96%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	5.989	0%	0%	79,96%	100%

2.1.3 Target Kinerja DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan di Triwulan II Tahun 2026 merujuk pada Rencana Penarikan Dana dari hasil POK Revisi 5 DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan pada tanggal 11 Mei 2026, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Semula:

Tabel 2.1.3. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Perumahan Perdesaan)

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						85.937.447	0,35%	64,13%	78,46%	100%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						85.906.901	0,35%	64,15%	78,47%	100%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomenda si Kebijakan	1	131.593	0,00%	19,11%	42,13%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomenda si Kebijakan	1	131.593	0,00%	19,11%	42,13%	100%
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.BMA	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	48.125	0,00%	40,52%	56,10%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	48.125	0,00%	40,52%	56,10%	100%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	125.456	43,52%	58,50%	73,25%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	60.181	29,54%	45,00%	60,00%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	65.275	56,41%	70,94%	85,47%	100%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomenda si Kebijakan	1	14.000	0,00%	50,00%	100,00 %	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomenda si Kebijakan	1	14.000	0,00%	50,00%	100,00 %	100%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	15.000	0,00%	66,67%	66,67%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	15.000	0,00%	66,67%	66,67%	100%
IKK : Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	20	6.889.491	0,00%	0,00%	41,93%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	20	6.889.491	0,00%	0,00%	41,93%	100%

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
SK : Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomenda si Kebijakan	1	78.469	35,68%	50,63%	80,51%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomenda si Kebijakan	1	78.469	35,68%	50,63%	80,51%	100%
IKK : Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan										
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	3600	78.604.767	0,27%	69,88%	81,75%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1200	26.266.951	0,70%	20,81%	50,86%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	2400	52.337.816	0,06%	94,51%	97,26%	100%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						30.546	0,00%	32,93%	41,30%	100%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	24.801	0,00%	40,55%	50,87%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	9.628	0,00%	0,00%	0,00%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	7.500	0,00%	100,00 %	100,00 %	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	7.673	0,00%	33,33%	66,67%	100%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	5.745	0%	0%	0%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	5.745	0%	0%	0%	100%

Menjadi:

Tabel 2.1.3. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Perumahan Perdesaan)

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						85.814.977	0,33%	64,22%	78,50%	100,00%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						85.795.193	0,33%	64,22%	78,50%	100,00%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	91.778	0,00%	43,80%	43,80%	100,00%

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	91.778	0,00%	43,80%	43,80%	100,00%
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.BMA	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	1	30.766	0,00%	74,23%	74,23%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	30.766	0,00%	74,23%	74,23%	100,00%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	125.456	43,52%	58,50%	73,25%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	60.181	29,54%	45,00%	60,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	65.275	56,41%	70,94%	85,47%	100,00%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	8.347	12,22%	28,51%	89,61%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	8.347	12,22%	28,51%	89,61%	100,00%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	6.508	0,00%	31,35%	68,22%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	6.508	0,00%	31,35%	68,22%	100,00%
IKK : Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	20	6.889.491	0,00%	0,00%	41,93%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	20	6.889.491	0,00%	0,00%	41,93%	100,00%
SK : Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	38.080	41,57%	67,66%	84,76%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	38.080	41,57%	67,66%	84,76%	100,00%
IKK : Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan										
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	3600	78.604.767	0,27%	69,88%	81,75%	100,00%

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target TW-I	Target TW-II	Target TW-III	Target TW-IV
		Satker PKP Prov. Bengkulu		Unit	1200	26.266.951	0,70%	20,81%	50,86%	100,00%
		Satker PKP Prov. Jambi		Unit	2400	52.337.816	0,06%	94,51%	97,26%	100,00%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						19.784	0,00%	50,84%	87,07%	100,00%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	18.061	0,00%	55,69%	85,84%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	2.888	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	7.500	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	7.673	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1.723	0%	0%	100%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	1.723	0%	0%	100%	100%

2.1.4 Target Kinerja DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan di Triwulan II Tahun 2026 merujuk pada Rencana Penarikan Dana dari hasil POK Revisi 5 DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan pada tanggal 11 Mei 2026, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Semula:

Tabel 2.1.4. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Perumahan Perkotaan)

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						28.381.383	8,89%	71,79%	84,45%	99,76%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						28.312.122	8,91%	71,91%	84,45%	99,76%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomenda si Kebijakan	1	58.528	0,00%	10,25%	54,16%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomenda si Kebijakan	1	58.528	0,00%	10,25%	54,16%	100%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	102.621	0,00%	41,75%	63,22%	100%

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target	
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV	
				Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	46.413	0,00%	57,00%	57,00%	100%
				Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	28.186	0,00%	25,00%	70,00%	100%
				Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	28.022	0,00%	33,34%	66,69%	100%
SK : Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan											
IKK : Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan											
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana								
	RO	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	38.253	0,00%	36,60%	73,20%	100%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	38.253	0,00%	36,60%	73,20%	100%
SK : Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan											
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana								
	RO	ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	33.969	0,00%	38,27%	76,54%	100%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	33.969	0,00%	38,27%	76,54%	100%
SK : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan											
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana								
	RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	65.681	0,00%	50,02%	73,35%	100%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	65.681	0,00%	50,02%	73,35%	100%
IKK : Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan											
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman								
	RO	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	12	7.924.502	30,76%	81,93%	99,05%	99,14%	
				Satker PKP Prov. Jambi	Unit	12	7.924.502	30,76%	81,93%	99,05%	99,14%
SK : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan											
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana								
	RO	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	54.217	57,59%	60,36%	85,01%	100%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	54.217	57,59%	60,36%	85,01%	100%
IKK : Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan											
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman								
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	900	20.034.351	0,27%	68,51%	78,94%	100%	
				Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	300	6.941.717	0,54%	20,10%	44,74%	100%

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	600	13.092.634	0,12%	94,18%	97,07%	100%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						69.261	3,51%	20,75%	85,67%	100%
SK : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	39.175	6,21%	14,73%	91,22%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	13.994	0,00%	0,00%	99,04%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	12.836	0,00%	0,00%	100%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	12.345	19,71%	46,74%	73,24%	100%
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	15.090	0,00%	57,00%	57,00%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	15.090	0,00%	57,00%	57,00%	100%
IKK : Jumlah Layanan BMN										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.956	Layanan BMN	Layanan	1	14.996	0,00%	0,00%	100%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	14.996	0,00%	0,00%	100%	100%

Menjadi:

**Tabel 2.1.4. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Perumahan Perkotaan)**

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						28.296.083	8,92%	71,93%	84,52%	99,77%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						28.230.822	8,93%	72,03%	84,54%	99,76%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	48.528	0,00%	62,35%	62,35%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	48.528	0,00%	62,35%	62,35%	100%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	81.121	0,00%	31,37%	77,75%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	24.913	0,00%	36,36%	98,97%	100%

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	28.186	0,00%	25,00%	70,00%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	28.022	0,00%	33,34%	66,69%	100%
SK : Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan										
IKK : Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	26.453	0,00%	36,60%	73,20%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	26.453	0,00%	36,60%	73,20%	100%
SK : Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	23.969	0,00%	38,27%	76,54%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	23.969	0,00%	38,27%	76,54%	100%
SK : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	37.681	0,00%	0,00%	50,84%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	37.681	0,00%	0,00%	50,84%	100%
IKK : Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	12	7.924.502	30,76%	81,93%	99,05%	99,14%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	12	7.924.502	30,76%	81,93%	99,05%	99,14%
SK : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	54.217	57,59%	77,02%	95,79%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	54.217	57,59%	77,02%	95,79%	100%
IKK : Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan										
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	900	20.034.351	0,27%	68,51%	78,94%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	300	6.941.717	0,54%	20,10%	44,74%	100%

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	600	13.092.634	0,12%	94,18%	97,07%	100%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN							3,73%	30,01%	77,67%	106,13%
SK : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	39.175	6,21%	28,03%	69,15%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	13.994	0,00%	37,24%	37,24%	100%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	12.836	0,00%	0,00%	100,00%	100%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	12.345	19,71%	46,74%	73,24%	100%
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	15.090	0,00%	57,00%	57,00%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	15.090	0,00%	88,38%	99,98%	100%
IKK : Jumlah Layanan BMN										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.Z06	Layanan BMN	Layanan	1	10.996	0,00%	0,00%	100,00%	100%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	10.996	0,00%	0,00%	0,00%	100%

2.1.5 Target Kinerja DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Target Kinerja BP3KP Sumatera IV pada DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Triwulan II Tahun 2026 merujuk pada Rencana Penarikan Dana dari hasil POK Revisi 5 DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada tanggal 11 Mei 2026, dengan rincian dapat dilihat pada 20able berikut:

Semula:

Tabel 2.1.5. 1 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV
(Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						157.167	0%	31,14%	58,90%	100%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	33.533	0,00%	51,17%	61,57%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	33.533	0,00%	51,17%	61,57%	100,00%
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegarah Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	98.655	0,00%	14,19%	48,47%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	98.655	0,00%	14,19%	48,47%	100,00%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko										
1	KRO	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1	24.979	0,00%	71,17%	96,51%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	24.979	0,00%	71,17%	96,51%	100,00%

Menjadi:

Tabel 2.1.5. 2 Rincian Target Capaian TA 2026 BP3KP Sumatera IV (Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko)

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Anggaran (Rp x 1.000)	Target	Target	Target	Target
							TW-I	TW-II	TW-III	TW-IV
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						85.546	0%	55,74%	82,49%	100,00%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	15.339	0,00%	84,46%	96,72%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	15.339	0,00%	84,46%	96,72%	100,00%
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegarah Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	58.253	0,00%	58,25%	80,43%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	58.253	0,00%	58,25%	80,43%	100,00%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko										
1	KRO	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1	11.954	0,00%	6,69%	74,28%	100,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	11.954	0,00%	6,69%	74,28%	100,00%

2.2 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja yang dilakukan melalui pendekatan berbasis hasil (*result based performance*) dengan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Pengukuran ini menitikberatkan pada capaian program pembangunan perumahan layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan. Data kinerja dihimpun dari laporan pelaksanaan kegiatan, monitoring lapangan, serta evaluasi capaian fisik dan keuangan. Selanjutnya, hasil pengukuran dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja dan rencana kerja tahunan untuk menilai Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Proses evaluasi juga melibatkan analisis dampak terhadap Masyarakat, seperti penurunan Kawasan kumuh dan peningkatan akses hunian layak sehingga dapat menjadi

dasar dalam perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

2.3 Capaian Target Triwulan II

Pada Tahun Anggaran 2026, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV memiliki 18 (delapan belas) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja Kegiatan, 32 (tiga puluh dua) Klasifikasi Kinerja Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Paket / Rincian Output yang terbagi dalam Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen. Adapun capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV pada Triwulan II terhadap masing-masing Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

2.3.1 Capaian Target TW- II DIPA Sekretariat Jenderal

Tabel 2.3.1. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Sekretariat Jenderal

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Target	PAGU	REALISASI TW - II		SELISIH
						TW-II		Rp		
UNOR : SEKRETARIAT JENDERAL						57,42%	2.000.191.000	999.088.236	49,95%	-7,47%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						57,42%	2.000.191.000	999.088.236	49,95%	-7,47%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	91,32%	69.798.000	63.974.645	91,66%	0,34%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	96,79%	35.994.000	34.838.812	96,79%	0,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	68,00%	14.960.000	11.562.833	77,29%	9,29%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	93,26%	18.844.000	17.573.000	93,26%	0,00%
IKK : Jumlah Layanan Perkantoran										
2	KRO	7665.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal							
	RO	EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	3	50,91%	1.722.316.000	750.258.941	43,56%	-7,35%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	38,65%	899.299.000	238.962.649	26,57%	-12,08%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	49,53%	438.808.000	274.416.342	62,54%	13,01%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	61,65%	384.209.000	236.879.950	61,65%	0,00%
IKK : Jumlah Layanan Sarana Internal										
3	KRO	7665.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
	RO	EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	42	99,99%	208.077.000	184.854.650	88,84%	-11,15%
			Balai P3KP Sumatera IV	Unit	40	91,35%	104.039.000	80.837.700	77,70%	-13,65%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1	100,00%	52.019.000	52.019.000	100,00%	0,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	1	99,96%	52.019.000	51.997.950	99,96%	0,00%

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan II adalah sebesar 57,42% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 49,95% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target

Capaian pada Triwulan II adalah sebesar -7,47%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan II belum mencapai target, sehingga harus dilakukan peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

2.3.2 Capaian Target TW- II DIPA Ditjen Kawasan Permukiman

Tabel 2.3.2. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Kawasan Permukiman

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Target	PAGU	REALISASI TW - II		SELISIH
						TW-II		Rp	%	%
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN						35,51%	41.834.407.000	16.828.276.363	40,23%	4,71%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						35,53%	41.738.352.000	16.797.820.538	40,25%	4,72%
SK : Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni										
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.BMA	Data dan Informasi Publik							
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	99,12%	15.827.000	6.688.180	42,26%	56,86%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	99,12%	15.827.000	6.688.180	42,26%	56,86%
IKK : Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	PBF.001	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	38,94%	61.103.000	25.385.762	41,55%	2,61%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	38,94%	61.103.000	25.385.762	41,55%	2,61%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman										
1	KRO	7659.CBR	Dukungan Teknis							
	RO	CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengerbangan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	49,02%	96.406.000	53.243.480	55,23%	6,21%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokumen	1	49,02%	96.406.000	53.243.480	55,23%	6,21%
IKK : Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas										
1	KRO	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	1.882	35,47%	41.565.016.000	16.712.503.116	40,21%	4,74%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	1.500	27,66%	33.080.049.000	11.050.602.466	33,41%	5,75%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	382	66,73%	8.484.967.000	5.661.900.650	66,73%	0,00%
IKK : Jumlah Unit Rumah yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (PK)										
1	KRO	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.007	Rumah Bersanitasi Layak	Unit	200	0,29%	2.001.067.000	5.710.000	0,29%	0,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	200	0,29%	2.001.067.000	5.710.000	0,29%	0,00%
SK : Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu										
IKK : Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani secara Terpadu										

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Target	PAGU	REALISASI TW - II		SELISIH
						TW-II		Rp	%	%
1	KRO	7659.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.006	Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	18,13	1,60%	6.693.959.000	106.819.000	1,60%	0,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Hektar	18,13	1,60%	6.693.959.000	106.819.000	1,60%	0,00%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						29,52%	96.055.000	30.455.825	31,71%	
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	30,47%	88.409.000	29.095.825	32,91%	2,44%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	85,28%	13.357.000	11.391.176	85,28%	0,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	38,00%	45.812.000	17.704.649	38,65%	0,65%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	0,00%	29.240.000	-	0,00%	0,00%
	RO	EBA.963	Jumlah Data dan Informasi	Layanan	1	82,08%	1.657.000	1.360.000	82,08%	0,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	82,08%	1.657.000	1.360.000	82,08%	0,00%
	RO	EBA.956	Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	0,00%	5.989.000	-	0,00%	0,00%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	0,00%	5.989.000	-	0,00%	0,00%

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan II adalah sebesar 35,51% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 40,23% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target Capaian pada Triwulan II adalah sebesar +4,71%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan II telah mencapai target.

2.3.3 Capaian Target TW- II DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan

Tabel 2.3.3. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Perumahan Perdesaan

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Target	PAGU	REALISASI TW - II		SELISIH
						TW-II		Rp	%	%
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN						30,91%	96.237.074.000	32.739.076.115	34,02%	3,10%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						30,91%	96.227.760.000	32.736.856.115	34,02%	3,11%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.009	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekome ndasi Kebijakana n	1	43,80%	91.778.000	34.622.200	37,72%	-6,08%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekome ndasi Kebijakana n	1	43,80%	91.778.000	34.622.200	37,72%	-6,08%
IKK : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.BMA	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokume n	1	74,23%	30.766.000	15.967.732	51,90%	-22,33%
			Balai P3KP Sumatera IV	Dokume n	1	74,23%	30.766.000	15.967.732	51,90%	-22,33%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	60,62%	90.016.000	63.316.500	70,34%	9,72%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	45,00%	34.381.000	21.580.000	62,77%	17,77%
			Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	75,02%	55.635.000	41.736.500	75,02%	0,00%
SK : Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekome ndasi Kebijakana n	1	28,51%	8.347.000	3.080.000	36,90%	8,39%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekome ndasi Kebijakana n	1	28,51%	8.347.000	3.080.000	36,90%	8,39%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	31,35%	6.508.000	2.040.000	31,35%	0,00%

No		Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO		Satuan	Target PK	Target	PAGU	REALISASI TW - II		SELISIH
						TW-II		Rp	%	%
		Balai P3KP Sumatera IV		Laporan	1	31,35%	6.508.000	2.040.000	31,35%	0,00%
IKK : Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.002	Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	20	1,80%	6.835.801.000	123.085.150	1,80%	0,00%
		Satker PKP Prov. Jambi		Unit	20	1,80%	6.835.801.000	123.085.150	1,80%	0,00%
SK : Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan										
1	KRO	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekome ndasi Kebijaka n	1	67,66%	38.080.000	19.230.720	50,50%	-17,16%
		Balai P3KP Sumatera IV		Rekome ndasi Kebijaka n	1	67,66%	38.080.000	19.230.720	50,50%	-17,16%
IKK : Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan										
1	KRO	7660.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	4125	33,37%	89.126.464.000	32.475.513.813	36,44%	3,07%
		Satker PKP Prov. Bengkulu		Unit	1200	20,81%	26.034.739.000	7.455.734.513	28,64%	7,83%
		Satker PKP Prov. Jambi		Unit	2925	39,67%	63.091.725.000	25.019.779.300	39,66%	-0,01%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						37,91%	9.314.000	2.220.000		
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	41,53%	7.591.000	2.220.000	29,25%	-12,28%
		Balai P3KP Sumatera IV		Layanan	1	0,00%	2.888.000	-	0,00%	0,00%
		Satker PKP Prov. Bengkulu		Layanan	1	100%	2.250.000	2.220.000	98,67%	-1,33%
		Satker PKP Prov. Jambi		Layanan	1	0,00%	2.453.000	-	0,00%	0,00%
SK : Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan										
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	0%	1.723.000	-	0,00%	0,00%
		Balai P3KP Sumatera IV		Layanan	1	0%	1.723.000	-	0,00%	0,00%

Berdasarkan Tabel 2.7 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan II adalah sebesar 30,91% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 34,02% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target

Capaian pada Triwulan II adalah sebesar +3,10%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan II telah mencapai target.

2.3.4 Capaian Target TW- II DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan

Tabel 2.3.4. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen. Perumahan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Target	PAGU	REALISASI TW - II		SELISIH	
						TW-II		Rp	%	%	
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						35,35%	27.908.046.000	11.018.796.258	39,48%	4,13%	
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						35,38%	27.852.922.000	10.985.432.052	39,44%	4,06%	
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan											
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana								
	RO	ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	62,35%	48.528.000	30.691.476	63,24%	0,89%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	62,35%	48.528.000	30.691.476	63,24%	0,89%
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan											
1	KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan								
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	14,38%	51.221.000	2.053.000	4,01%	-10,37%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	36,36%	24.913.000	193.000	0,77%	-35,59%
				Satker PKP Prov. Bengkulu	Laporan	1	0,00%	6.288.000	-	0,00%	0,00%
				Satker PKP Prov. Jambi	Laporan	1	9,29%	20.020.000	1.860.000	9,29%	0,00%
SK : Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan											
IKK : Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan											
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana								
	RO	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	36,60%	26.453.000	11.052.000	41,78%	5,18%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	36,60%	26.453.000	11.052.000	41,78%	5,18%
SK : Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan											
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana								
	RO	ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	38,27%	23.969.000	2.280.000	9,51%	-28,76%	
				Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	38,27%	23.969.000	2.280.000	9,51%	-28,76%
SK : Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan											
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan											

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Target	PAGU	REALISASI TW - II		SELISIH
						TW-II		Rp	%	
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	37.681.000	150.000	0,40%	0,40%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	0,00%	37.681.000	150.000	0,40%	0,40%
IKK : Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	12	50,19%	7.924.502.000	3.977.121.150	50,19%	0,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	12	50,19%	7.924.502.000	3.977.121.150	50,19%	0,00%
SK : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan										
1	KRO	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	77,02%	54.217.000	40.860.300	75,36%	-1,66%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	77,02%	54.217.000	40.860.300	75,36%	-1,66%
IKK : Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan										
1	KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman							
	RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	900	29,49%	19.686.351.000	6.921.224.126	35,16%	5,67%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Unit	300	20,10%	6.793.717.000	2.477.253.126	36,46%	16,36%
			Satker PKP Prov. Jambi	Unit	600	34,47%	12.892.634.000	4.443.971.000	34,47%	0,00%
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN						21,17%	55.124.000	33.364.206	60,53%	39,36%
SK : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan										
IKK : Jumlah Layanan Umum										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	3	13,30%	29.038.000	20.027.826	68,97%	55,67%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	37,24%	13.994.000	5.211.526	37,24%	0,00%
			Satker PKP Prov. Bengkulu	Layanan	1	0,00%	11.140.000	11.140.000	100,00%	100,00%
			Satker PKP Prov. Jambi	Layanan	1	0,00%	3.904.000	3.676.300	94,17%	94,17%
IKK : Jumlah Layanan Data dan Informasi										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	57,00%	15.090.000	13.336.380	88,38%	31,38%
			Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	88,38%	15.090.000	13.336.380	88,38%	0,00%
IKK : Jumlah Layanan BMN										
1	KRO	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
	RO	EBA.Z06	Layanan BMN	Layanan	1	0,00%	10.996.000	-	0,00%	0,00%

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO	Satuan	Target PK	Target	PAGU	REALISASI TW - II		SELISIH
				TW-II		Rp	%	%
	Balai P3KP Sumatera IV	Layanan	1	0,00%	10.996.000	-	0,00%	0,00%

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan II adalah sebesar 35,35% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 39,48% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target Capaian pada Triwulan II adalah sebesar +4,13%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan I telah mencapai target.

2.3.5 Capaian Target TW- II DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Tabel 2.3.5. 1 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera IV terhadap Target Ditjen TKPR

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator / KRO / RO			Satuan	Target PK	Target	PAGU	REALISASI TW - II		SELISIH
						TW-II		Rp	%	%
UNOR : DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO						55,74%	85.546.000	40.944.000	47,86%	-7,88%
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	84,46%	15.339.000	13.966.000	91,05%	6,59%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	84,46%	15.339.000	13.966.000	91,05%	6,59%
SK : Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi										
1	KRO	7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana							
	RO	ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegarah Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	58,25%	58.253.000	26.978.000	46,31%	-11,94%
			Balai P3KP Sumatera IV	Rekomendasi Kebijakan	1	58,25%	58.253.000	26.978.000	46,31%	-11,94%
SK : Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman										
IKK : Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko										
1	KRO	7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
	RO	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Laporan	1	6,69%	11.954.000	-	0,00%	-6,69%
			Balai P3KP Sumatera IV	Laporan	1	6,69%	11.954.000	-	0,00%	-6,69%

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat dilihat Target Capaian BP3KP Sumatera IV pada akhir Triwulan II adalah sebesar 55,74% dengan Realisasi Capaian adalah sebesar 47,86% sehingga didapatkan nilai selisih antara Realisasi dengan Target

Capaian pada Triwulan II adalah sebesar -7,88%. Hal ini menyimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada Triwulan II belum mencapai target, sehingga harus dilakukan peningkatan kinerja di triwulan selanjutnya.

2.4 Permasalahan / Faktor Keberhasilan

Permasalahan yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV pada Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. 1 Permasalahan BP3KP Sumatera IV pada Triwulan II

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
UNOR: SEKRETARIAT JENDERAL			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Jumlah Layanan Umum	BALAI:- BENGKULU:- JAMBI: -
		Jumlah Layanan Perkantoran	BALAI: Keterlambatan proses SPJ pada bulan Juni dikarenakan pergantian PPK Balai BENGKULU:- JAMBI: -
		Jumlah Layanan Sarana Internal	BALAI: Keterlambatan proses SPJ pada bulan Juni dikarenakan pergantian PPK Balai BENGKULU:- JAMBI: -
UNOR: DITJEN. KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	BALAI: menunggu pelaksanaan kegiatan kumuh dan sanitasi di Kab. Tanjung Jabung timur
		Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	BALAI: -
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	BALAI: -
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	BENGKULU: - Rendahnya persentase kelolosan hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan BSPS - Terdapat Desa Pagar di Kabupaten Seluma mundur dari kegiatan BSPS karena terjadi indikasi keberpihakan pada saat Pemilihan Toko Terbuka (PTT).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
			- Terjadinya pemalsuan data dan informasi tempat tinggal oleh Calon Penerima Bantuan di Desa Layang Lekat dan Desa Arga Indah I Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah JAMBI: - data CPB dari Instruksi Verifikasi banyak yang tidak direkomendasikan, berdasarkan total data per - 26 Juni 2026, dari 4.424 Unit yang di verifikasi, 2.874 unit direkomendasikan, dan 1.550 tidak direkomendasikan - Indikator kinerja BSPS direncanakan untuk dimulai pada Triwulan II
3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan Umum	BALAI:- BENGKULU:- JAMBI: -
		Jumlah Data dan Informasi	BALAI: -
		Jumlah Layanan BMN	BALAI: -
UNOR: DITJEN. PERUMAHAN PERDESAAN			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BALAI: -
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BALAI: -
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BENGKULU: JAMBI:
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	BALAI: -
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	BALAI: -
		Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	JAMBI: - Land clearing pembangunan area rumah khusus yang terhambat karna alat yang tidak memadai
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	BALAI: personil yg ditugaskan sedang ada penugasan lain, padatnya jadwal kegiatan tim kasi 2

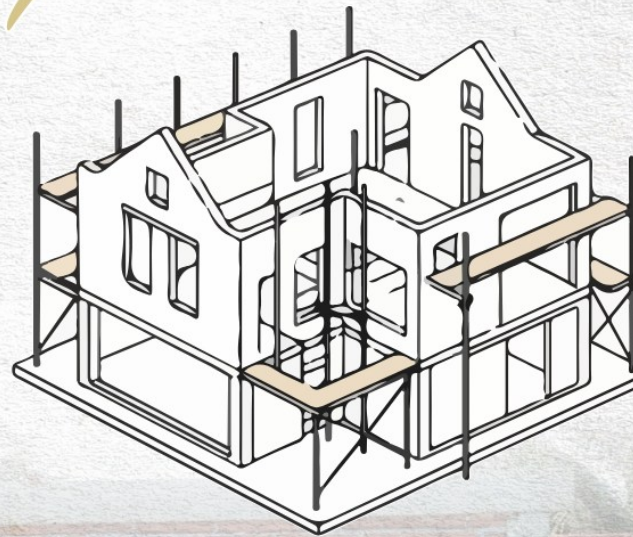
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
	kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	BENGKULU: - Rendahnya persentase kelolosan hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan BPS JAMBI: - data CPB dari Instruksi Verifikasi banyak yang tidak direkomendasikan, berdasarkan total data per - 26 Juni 2026, dari 4.424 Unit yang di verifikasi, 2.874 unit direkomendasikan, dan 1.550 tidak direkomendasikan
4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Umum	BALAI:- BENGKULU:- JAMBI: -
5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Data dan Informasi	BALAI: telah dilakukan pendataan di kegiatan sinkron pusat daerah. sehingga blm dilaksanakan untuk turun ke daerah
UNOR: DITJEN. PERUMAHAN PERKOTAAN			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	BALAI: -
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	BALAI: kegiatan fisik masih belum mulai pelaksanaan BENGKULU:- JAMBI: -
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	BALAI: padatnya tugas dari personil kasi 2 sehingga terjadi reschedule jadwal pelaksanaan kegiatan di prov. jambi
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	BALAI: padatnya tugas dari personil kasi 2 sehingga terjadi reschedule jadwal pelaksanaan kegiatan di prov. jambi
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	BALAI: -
		Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	JAMBI: - Kekurangan Tenaga Kerja (Man Power), dikarenakan keterlambatan proses pelaksanaan fisik dari periode sebelumnya. Maka proses percepatan terkendala kekurangan tenaga kerja (khususnya saat masuk ke pekerjaan Arsitektur serta Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing/MEP)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
			- Faktor Cuaca (Hujan) Curah hujan menyebabkan potensi idle time (waktu tunggu/jeda pengerjaan) serta adanya ancaman air hujan yang masuk ke area lubang vertikal atau dak yang dapat merusak/menggenangi area kerja dan instalasi di lantai bawahnya. - Tertib Administrasi, Beberapa kelengkapan dokumen teknis, administrasi, dan pencatatan pekerjaan di lapangan masih belum lengkap atau terlambat diselesaikan. - Kepatuhan K3 dan Handling Material, Diperlukan sinkronisasi antara alat, bahan, dan tenaga kerja secara presisi agar tidak membuang waktu (handling time tinggi) di proyek, serta masih perlunya pengawasan ketat terhadap kedisiplinan pekerja dalam memakai Alat Pelindung Diri (APD).
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	BALAI: sudah dilaksanakan, menunggu proses di keuangan
		Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	BENGKULU: - Rendahnya persentase kelolosan hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan BPS JAMBI: - Data CPB dari Instruksi Verifikasi banyak yang tidak direkomendasikan, berdasarkan total data per 26 Juni 2026, dari 4.424 Unit yang di verifikasi, 2.874 unit direkomendasikan, dan 1.550 tidak direkomendasikan
6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan Umum	BALAI:- BENGKULU:- JAMBI: -
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	BALAI: -
		Jumlah Layanan BMN	BALAI: -
UNOR: DITJEN. TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO			
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	BALAI: -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERMASALAHAN
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	BALAI: menunggu kebijakan dari pusat terkait kegiatan SMAP
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	BALAI: menunggu kegiatan berjalan (BSPS, Rusun, Rusus, Kumuh dan Sanitasi)

BAB III

Perutup



BAB III PENUTUP

3.1 RENCANA TINDAK LANJUT

Pelaksanaan penyerapan anggaran di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV pada Triwulan II terdapat permasalahan. Adapun rencana tindak lanjut dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. 1 Rencana Tindak Lanjut BP3KP Sumatera IV pada Triwulan II

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - I)			TRIWULAN SAAT INI (TW - II)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW III
UNOR: SEKRETARIAT JENDERAL								
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Jumlah Layanan Umum	BALAI BKL JBI	BALAI: - Masih belum terdapat pegawai yang memiliki kompetensi khusus dalam menyusun strategi peningkatan engagement serta pengelolaan media sosial di lingkungan Kementerian PKP. BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : - TIDAK ADA	BALAI: - Keikutsertaan salah satu pegawai dalam Bimtek Strategi Peningkatan Engagement dan Pengelolaan Media Sosial Kementerian PKP BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -TIDAK ADA		BALAI: - BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -TIDAK ADA	BALAI: - BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -TIDAK ADA
		Jumlah Layanan Perkantoran	BALAI BKL JBI	BALAI: - BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : - TIDAK ADA	BALAI: - BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : - TIDAK ADA		BALAI: - Keterlambatan proses SPJ pada bulan Juni dikarenakan pergantian PPK Balai BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : - TIDAK ADA	BALAI: - akan segera dilaksanakan di Bulan Juli BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : - TIDAK ADA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - I)			TRIWULAN SAAT INI (TW - II)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW III
		Jumlah Layanan Sarana Internal	BALAI BKL JBI	BALAI: - BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -TIDAK ADA	BALAI: - BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -TIDAK ADA		BALAI: - keterlambatan proses akibat pergantian PPK Balai BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -TIDAK ADA	BALAI: - akan segera dilaksanakan di Bulan Juli BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -TIDAK ADA
UNOR: DITJEN. KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: - menunggu pelaksanaan kegiatan kumuh dan sanitasi di kab. tanjung jabung timur	BALAI: - menunggu pelaksanaan kegiatan fisik
		Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: -	BALAI: -
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	BALAI	BALAI: - kurang lengkapnya RC usulan Dokumen Administrasi dan dokumen teknis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	BALAI: -		BALAI: -	BALAI: -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - I)			TRIWULAN SAAT INI (TW - II)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW III
		Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	BKL JBI	BENGKULU: - Ketidak sesuaian data CPB pada DTSEN - Lamanya proses pengusulan pengganti CPB dari Pemda/Kota - Surat Instruksi Verifikasi turun bertahap - Belum terbitnya SK Penetapan Dirjen CPB BSPS JAMBI : - Indikator kinerja BSPS (Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya) direncanakan untuk dimulai pada Triwulan II	BENGKULU: - Pembaruan DTSEN - Koordinasi dengan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota - Belum terbitnya SK Penetapan Dirjen CPB BSPS - Menunggu Surat Keputusan Dirjen Penetapan Calon Penerima Bantuan, Penandatanganan Perjanjian Kerja Tenaga Ahli, Korkab/Korkot dan Tenaga Fasilitator Lapangan dan Pelaksanaan fisik. JAMBI : - Melakukan persiapan kegiatan BSPS yang akan dimulai pada Triwulan II, seperti perekrutan TFL dan Korkab / Korkot, Verifikasi CPB, Seleksi Bank / Pos Penyalur, dan persiapan lainnya	BENGKULU: - Mengadakan Kegiatan (FGD) Pengusulan Calon Penerima Bantuan untuk mengatasi Permasalahan Tingkat Kelolosan Instruksi Verifikasi yang rendah di Provinsi Bengkulu dengan narasumber dari 3 Direktorat Jenderal Teknis dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; Penambahan pengusul BSPS seperti BNPP, Kemenbud, Aspirasi DPD RI dan DPR RI.  Link notulensi: 30062026 Notulensi FGD Pengusulan CPB untuk mengatasi Permasalahan Tingkat Kelolosan Inver yang Rendah di Provinsi Bengkulu.pdf - Melaksanakan koordinasi dengan Dinas dan Pemda terkait pengusulan Calon Penerima Bantuan.	BENGKULU: - Rendahnya persentase kelolosan hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan BSPS - Terdapat Desa Pagar di Kabupaten Seluma mundur dari kegiatan BSPS karena terjadi indikasi keberpihakan pada saat Pemilihan Toko Terbuka (PTT). - Terjadinya pemalsuan data dan informasi tempat tinggal oleh Calon Penerima Bantuan di Desa Layang Lekat dan Desa Arga Indah I Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah JAMBI : - data CPB dari Instruksi Verifikasi banyak yang tidak direkomendasikan, berdasarkan total data per 26 Juni 2026, dari 4.424 Unit yang di verifikasi, 2.874 unit direkomendasikan, dan 1.550 tidak direkomendasikan	BENGKULU: - Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada instansi pengusul BSPS. - Dilakukan pengusulan pergantian desa penerima BSPS. - Dilakukan koordinasi antara tim Satker PKP Provinsi Bengkulu, perangkat desa dan calon penerima bantuan terkait penyelesaian masalah tersebut JAMBI : - Percepatan penyelesaian inputing data verifikasi CPB, dengan: • Input/upload data CPB kedalam Aplikasi GOPKP hingga lengkap sesuai persyaratan yang diminta dan segera kirim (submit) agar menambah progres. • Sehubungan dengan hasil verifikasi CPB eBSPS pertanggal 26/06/2026 yang direkomendasi baru mencapai 2.874 unit sedangkan yang tidak direkomendasi 1.550 unit, selesai 4.424 unit (86,0%) dari quota tahap II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, maka dihimbau khususnya kepada Korkab dan TFL pada masing-masing Kabupaten/Kota untuk segera melengkapi kekurangan data yang diminta agar bisa segera dikirim (submit). • Koordinasi dengan pihak terkait terkait pemutakhiran data.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - I)			TRIWULAN SAAT INI (TW - II)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW III
						 - Surat Instruksi Verifikasi terakhir.  - Total Penerima bantuan sebanyak 523 unit (SK Penetapan PPK), TA sebanyak 0 orang, Korkab 5 orang dan TFL sebanyak 28 orang.  (Dokumentasi pembekalan Korkab/Kota dan TFL Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Bengkulu TA 2026		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - I)			TRIWULAN SAAT INI (TW - II)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW III
3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Jumlah Layanan Umum	BALAI BKL JBI	BALAI: - BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -	BALAI: - BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -		BALAI: - BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -	BALAI: - BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -
		Jumlah Data dan Informasi	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Layanan BMN	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: -	BALAI: -
UNOR: DITJEN. PERUMAHAN PERDESAAN								
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	BKL JBI	BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -TIDAK ADA	BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -TIDAK ADA		BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -TIDAK ADA	BENGKULU: - TIDAK ADA JAMBI : -TIDAK ADA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - I)			TRIWULAN SAAT INI (TW - II)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW III
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	JB	JAMBI: - Indikator kinerja Rumah Khusus Perumahan Perdesaan terkendala: • SK (Surat Keputusan) PPKRumah Khusus yang belum terbit Dokumen Proposal pemerintah daerah Batanghari masih belum sesuai berdasarkan hasil Vermin dan Vertek	JAMBI: - Melakukan koordinasi dengan pusat terkait SK PPK Rumah Khusus dan kelanjutan kegiatan Rumah Khusus • Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Batanghari untuk melengkapi Dokumen Proposal		JAMBI: - Land clearing pembangunan area rumah khusus yang terhambat karna alat yang tidak memadai	JAMBI: -Koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian land learing pembangunan area rumah khusus
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: - personil yg ditugaskan sedang ada penugasan lain, padatnya jadwal kegiatan tim kasi 2	BALAI: - akan dilaksanakan di bulan juli

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - I)			TRIWULAN SAAT INI (TW - II)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW III
		Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	BKL JBI	BENGKULU: - Ketidak sesuaian data CPB pada DTSEN - Lamanya proses pengusulan pengganti CPB dari Pemda - Surat Instruksi Verifikasi turun bertahap Belum terbitnya SK Penetapan CPB BSPS JAMBI : - Indikator kinerja BSPS (Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya) direncanakan untuk dimulai pada Triwulan II	BENGKULU: - Pembaruan DTSEN - Koordinasi dengan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota - Menunggu Surat Intruksi Verifikasi Menunggu Surat Keputusan Penetapan CPB, Penandatanganan Perjanjian Kerja Tenaga Ahli, Korkab/Korkot dan Tenaga Fasilitator Lapangan dan Pelaksanaan fisik. JAMBI : - Melakukan persiapan kegiatan BSPS yang akan dimulai pada Triwulan II, seperti perekrutan TFL dan Korkab / Korkot, Verifikasi CPB, Seleksi Bank / Pos Penyalur, dan persiapan lainnya]	BENGKULU: -Mengadakan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengusulan Calon Penerima Bantuan untuk mengatasi Permasalahan Tingkat Kelolosan Instruksi Verifikasi yang rendah di Provinsi Bengkulu dengan narasumber dari 3 Direktorat Jenderal Teknis dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; -Penambahan pengusul BSPS seperti BNPP, Kemenbud, Aspirasi DPD RI dan DPR RI. " Melaksanakan koordinasi dengan Dinas dan Pemda terkait pengusulan CPB. -Surat Instruksi Verifikasi terakhir. -Total Penerima bantuan sebanyak 349 unit (SK Penetapan PPK), TA sebanyak 1 orang, Korkab 4 orang dan TFL sebanyak 25 orang.	BENGKULU: -Rendahnya persentase kelolosan hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan BSPS JAMBI : - data CPB dari Instruksi Verifikasi banyak yang tidak direkomendasikan, berdasarkan total data per 26 Juni 2026, dari 4.424 Unit yang di verifikasi, 2.874 unit direkomendasikan, dan 1.550 tidak direkomendasikan	BENGKULU: - Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada instansi pengusul BSPS. JAMBI : - Percepatan penyelesaian inputing data verifikasi CPB, dengan: • Input/upload data CPB kedalam Aplikasi GOPKP hingga lengkap sesuai persyaratan yang diminta dan segera kirim (submit) agar menambah progres. • Sehubungan dengan hasil verifikasi CPB eBSPS pertanggal 26/06/2026 yang direkomendasi baru mencapai 2.874 unit sedangkan yang tidak direkomendasi 1.550 unit, selesai 4.424 unit (86,0%) dari quota tahap II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, maka dihimbau khususnya kepada Korkab dan TFL pada masing-masing Kabupaten/Kota untuk segera melengkapi kekurangan data yang diminta agar bisa segera dikirim (submit). • Koordinasi dengan pihak terkait terkait pemutakhiran data.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - I)			TRIWULAN SAAT INI (TW - II)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW III
4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Umum	BALAI BKL JBI	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : - TIDAK ADA	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : - TIDAK ADA		BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : - TIDAK ADA	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : - TIDAK ADA
5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Layanan Data dan Informasi	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: - telah dilakukan pendataan di kegiatan sinkron pusat daerah. sehingga blm dilaksanakan untuk turun ke daerah	BALAI: - akan dilaksanakan di bulan juli
UNOR : DITJEN. PERUMAHAN PERKOTAAN								
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: -	BALAI: -

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - I)			TRIWULAN SAAT INI (TW - II)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW III
	perumahan perkotaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	BALAI BKL JBI	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : - TIDAK ADA	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : - TIDAK ADA		BALAI: - kegiatan fisik masih belum mulai pelaksanaan BENGKULU: - JAMBI : - TIDAK ADA	BALAI: - menyesuaikan progres fisik kegiatan di lapangan BENGKULU: - JAMBI : - TIDAK ADA
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: - padatnya tugas dari personil kasi 2 sehingga terjadi reschedule jadwal pelaksanaan kegiatan di prov. jambi	BALAI: - akan dilaksanakan pada bulan september
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: - padatnya tugas dari personil kasi 2 sehingga terjadi reschedule jadwal pelaksanaan kegiatan di prov. jambi	BALAI: - akan dilaksanakan pada bulan september
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: -	BALAI: -

		Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	JBI	JAMBI: • Hambatan Meteorologis: Tingginya intensitas curah hujan yang berdampak langsung pada perlambatan ritme pekerjaan konstruksi di lapangan dan penurunan produktivitas harian • Disrupsi Rantai Pasok: Terjadinya keterlambatan dalam mobilisasi material bangunan menuju lokasi proyek, yang berpotensi menghambat pemenuhan target jadwal pada kurva-S.	JAMBI: • Intervensi Teknis Cuaca: - o Penyediaan instalasi pelindung sementara (seperti terpal atau atap buatan) untuk memproteksi aktivitas kritis, khususnya pekerjaan pembesian, agar tetap dapat berlangsung di tengah cuaca ekstrem. - o Restrukturisasi jadwal kerja harian dengan memprioritaskan penyelesaian item pekerjaan di area terlindung atau bagian dalam bangunan. - o Implementasi sistem monitoring cuaca secara berkala sebagai basis pengambilan keputusan operasional di lapangan. • Optimalisasi Manajemen Sumber Daya: - o Pengalihan sementara tenaga kerja ke sektor fabrikasi material dan persiapan teknis non-lapangan saat terjadi hujan guna memastikan jam kerja tetap efektif. - o Pelaksanaan tinjauan performa terhadap mitra pemasok (supplier) untuk mengevaluasi ketepatan waktu dan kapasitas distribusi		JAMBI: • Kekurangan Tenaga Kerja (Man Power), dikarenakan keterlambatan proses pelaksanaan fisik dari periode sebelumnya. Maka proses percepatan terkendala kekurangan tenaga kerja (khususnya saat masuk ke pekerjaan Arsitektur serta Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing/MEP) • Faktor Cuaca (Hujan) Curah hujan menyebabkan potensi idle time (waktu tunggu/jeda pengerjaan) serta adanya ancaman air hujan yang masuk ke area lubang vertikal atau dak yang dapat merusak/menggenangi area kerja dan instalasi di lantai bawahnya. • Tertib Administrasi, Beberapa kelengkapan dokumen teknis, administrasi, dan pencatatan pekerjaan di lapangan masih belum lengkap atau terlambat diselesaikan. • Kepatuhan K3 dan Handling Material, Diperlukan sinkronisasi antara alat, bahan, dan tenaga kerja secara presisi agar tidak membuang waktu (handling time tinggi) di proyek, serta masih perlunya pengawasan ketat terhadap kedisiplinan pekerja dalam memakai Alat Pelindung Diri (APD).	JAMBI: • Penambahan Personel dan Sistem Shift: Tim manajemen konstruksi dan kontraktor terus mengevaluasi dan melakukan penambahan man power (seperti mendatangkan ekstra pekerja secara berkala). Selain itu, pekerjaan krusial seperti pembesian dan pengecoran dilakukan dengan sistem lembur (full-shift) hingga selesai untuk mengejar ketertinggalan durasi 1-2 hari lebih cepat. • Mitigasi Cuaca dan Perlindungan Material: Menjaga kelancaran suplai material 100% ready stock pada titik yang terdekat dengan lokasi kerja (seperti meletakkan semen, mortar, dan bata ringan langsung di area lantai 2). Untukantisipasi cuaca, dilakukan pemasangan terpal pada area dak atas atau lubang vertikal lantai 2 untuk mencegah air hujan masuk merusak instalasi lantai 1, serta menjaga area kerja tetap bebas dari genangan air dan lumpur. • Percepatan Dokumen Proyek: Mempercepat penyelesaian dan melengkapi dokumen-dokumen administrasi teknis yang sebelumnya tertunda agar memenuhi tertib administrasi proyek. • Penerapan Checklist dan K3 (Keselamatan Kerja): Mengadakan Toolbox Meeting dan sosialisasi rutin kepada seluruh pekerja tentang kewajiban memakai APD standar (helm, rompi, sepatu safety, dan sarung tangan). Hasilnya, pekerja mematuhi aturan standar keselamatan dan dilaporkan tidak ada insiden (zero accident). Prosedur ketat checklist pekerjaan juga selalu dilakukan sesaat sebelum dimulainya proses pengecoran agar tidak terjadi kesalahan konstruksi.
--	--	---	-----	--	---	--	---	---

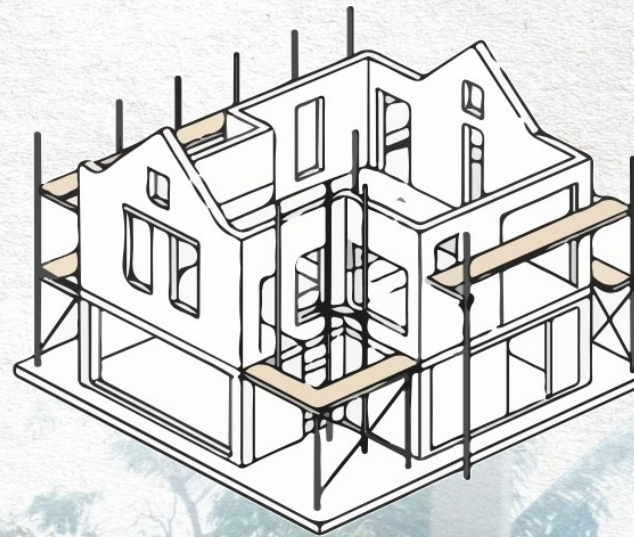
					material. o Sinkronisasi ulang jadwal pengiriman material dengan mempertimbangkan kondisi cuaca aktual serta ketersediaan kapasitas area penyimpanan di lokasi.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - I)			TRIWULAN SAAT INI (TW - II)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW III
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: - sudah dilaksanakan, menunggu proses di keuangan	BALAI: - menunggu bagian keuangan
		Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	BKL JBI	BENGKULU: - JAMBI : - Indikator kinerja BSPS (Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya) direncanakan untuk dimulai pada Triwulan II	BENGKULU: - JAMBI : - Melakukan persiapan kegiatan BSPS yang akan dimulai pada Triwulan II, seperti perekrutan TFL dan Korkab / Korkot, Verifikasi CPB, Seleksi Bank / Pos Penyalur, dan persiapan lainnya]		BENGKULU: - Rendahnya persentase kelolosan hasil verifikasi Calon Penerima Bantuan BSPS JAMBI : - data CPB dari Instruksi Verifikasi banyak yang tidak direkomendasikan, berdasarkan total data per 26 Juni 2026, dari 4.424 Unit yang di verifikasi, 2.874 unit direkomendasikan, dan 1.550 tidak direkomendasikan	BENGKULU: - Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada instansi pengusul BSPS. JAMBI : - Percepatan penyelesaian inputing data verifikasi CPB, dengan: • Input/upload data CPB kedalam Aplikasi GOPKP hingga lengkap sesuai persyaratan yang diminta dan segera kirim (submit) agar menambah progres. • Sehubungan dengan hasil verifikasi CPB eBSPS pertanggal 26/06/2026 yang direkomendasi baru mencapai 2.874 unit sedangkan yang tidak direkomendasi 1.550 unit, selesai 4.424 unit (86,0%) dari quota tahap II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, maka dihimbau khususnya kepada Korkab dan TFL pada masing-masing Kabupaten/Kota untuk segera melengkapi kekurangan data yang diminta agar bisa segera dikirim (submit). • Koordinasi dengan pihak terkait terkait pemutakhiran data.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - I)			TRIWULAN SAAT INI (TW - II)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW III
6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Jumlah Layanan Umum	BALAI BKL JBI	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : - tidak TIDAK ADA	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : - tidak TIDAK ADA		BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : - tidak TIDAK ADA	BALAI: - BENGKULU: - JAMBI : - tidak TIDAK ADA
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: -	BALAI: -
		Jumlah Layanan BMN	BALAI	BALAI: -	BALAI: -		BALAI: -	BALAI: -
UNOR: DITJEN. TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO								
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	BALAI	BALAI: - Tidak ada	BALAI: - Tidak ada		BALAI: - Tidak ada	BALAI: - Tidak ada
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	BALAI	BALAI: - Tidak ada	BALAI: - Tidak ada		BALAI: - menunggu kebijakan dari pusat terkait kegiatan SMAP	BALAI: - Menunggu arahan dari pusat

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	UNKER	TRIWULAN SEBELUMNYA (TW - I)			TRIWULAN SAAT INI (TW - II)	
				PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT (FOTO / LINK NOTULEN)	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT TW III
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	BALAI	BALAI: - Tidak ada	BALAI: - Tidak ada		BALAI: - menunggu kegiatan berjalan (BSPS, Kumuh, Rusus)	BALAI: - menunggu pelaksanaan fisik di satker

LAMPIRAN



LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Triwulan I

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	Jambi, 01 April 2026 Menghadiri Kegiatan Sertijab, Pembangunan Zona Integritas, Rapat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Balai P3KP Sumatera IV.	
	Jambi, 01 April 2026 Pengecekan Rusun Bersama Dir. TKPR dan Kabalai Sumatera IV.	
	Jambi, 01 April 2026 Agenda penguatan pembangunan Zona Integritas dan Sosialisasi keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas yang dipimpin Direktur keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan BP3KP Sumatera IV.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 02 April 2026 Membahas pemilihan bank penyalur dan pembuatan Kontrak dan SK TFL dan Korkab/kota.	
	Jambi, 06 April 2026 kunjungan lapangan Dirjen TKPR.	
	Bengkulu, 06-07 April 2026 Pembekalan Korkab/Kota dan TFL Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Bengkulu TA 2026.	
	Jambi, 07 April 2026 Kunjungan DJKPPerkot ke Rusun MA RI Jambi.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
2	Bengkulu, 08 April 2026 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Bengkulu TA 2026 antara Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.	
	Jambi, 15 April 2026 Membahas rencana pelaksanaan pembekalan TFL dan Korkab/kota.	
	Jambi, 16 April 2026 Monitoring evaluasi pembangunan dan budaya sadar risiko Rumah Susun MA RI PROV Jambi.	
	Jambi, 16 April 2026 Presentasi calon bank penyalur BSPS TA 2026.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 17 April 2026 Pembahasan hasil presentasi calon bank penyalur.	
6.	Jambi, 16 April 2026 Koordinasi dan kolaborasi dalam pengawalan proyek strategis nasional, khususnya di sektor penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Jambi. Bersama Kejaksaan Tinggi Jambi.	
	Jambi, 20 April 2026 Pembahasan draft perjanjian kerja sama.	
	Bengkulu, 20 April 2026 Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Korkab/Kota dan TFL Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap I Provinsi Bengkulu TA 2026.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
10.	Jambi, 21 April 2026 Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia terkait program BSPS Provinsi Jambi.	
	Bengkulu, 24 April 2026 Sosialisasi Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kota Bengkulu TA 2026	
	Bengkulu, 27 – 30 April 2026 Mendampingi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam Survei Lapangan dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan di Provinsi Bengkulu.	
	Bengkulu, 27 April 2026 Audensi Anggota DPR RI Komisi V bersama Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Bengkulu, 27 April 2026 Audensi Anggota DPR RI Komisi V bersama Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.	
	Jambi, 5 Mei 2026 Koordinasi terkait pengusulan rumah khusus di kabupaten Batanghari.	
	Bengkulu, 6 – 7 Mei 2026 Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Program Perumahan Wilayah Perkotaan, Perdesaan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Bengkulu TA 2026.	
	Bengkulu, 7 Mei 2026 Sosialisasi Layanan Klinik PKP melalui Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 7 Mei 2026 Entry Meeting dan Penandatanganan Pakta Integritas Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Provinsi Jambi TA 2026.	
	Jambi, 7 Mei 2026 Peresmian Program BPS Tahun Anggaran 2026 secara serentak di seluruh Pulau Sumatera.	
	Bengkulu, 6 – 7 Mei 2026 Sosialisasi Optimalisasi Layanan Klinik PKP Melalui Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi di Bengkulu.	
	Bengkulu, 6 – 7 Mei 2026 Rakor Percepatan Capaian 3 juta rumah di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong.	

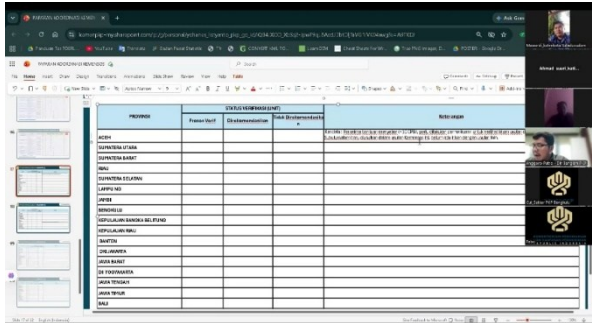
NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Bengkulu, 11 – 13 Mei 2026 Mendampingi Kunjungan Kerja Ketua DPD RI di Provinsi Bengkulu dalam kegiatan Sosialisasi Program Bantuan Bedah Rumah.	
	Jambi, 12 Mei 2026 Rapat Monitoring Pembangunan RUSUN MA RI.	
	Jambi, 12 Mei 2026 Verifikasi Teknis terhadap calon penerima bantuan peningkatan kualitas sanitasi rumah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	
	Jambi, 19 Mei 2026 Sosialisasi Budaya Sadar Risiko Hukum dan Budaya Sadar Risiko Korupsi.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 20 – 21 Mei 2026 Sinkronisasi dan koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi TA 2026.	
	Bengkulu, 22 Mei 2026 Pelepasan Pegawai Magang Kemenaker Tahun 2025.	
	Jambi, 22 Mei 2026 Rapat Pokja Zona Integritas Terkait Evaluasi LKE ZI BP3KP Sumatera IV.	
	Bengkulu, 22 Mei 2026 Rapat koordinasi bersama Dinas Perkim Provinsi Bengkulu dan Dinas Perkim Kota Bengkulu.	

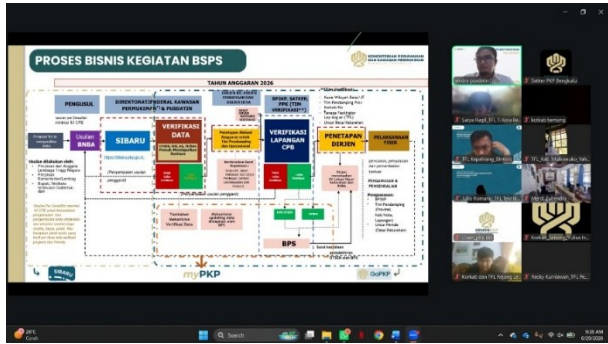
NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 22 Mei 2026 Asistensi Desain dan Warna Rusun ke Ketua Pengadilan Tinggi.	
	Jambi, 25 Mei 2026 Membahas Kegiatan Permukiman Kumuh.	
	Jambi, 26 Mei 2026 Tanda Tangan kontrak konsultan review DED kumuh.	
	Jambi, 02 Juni 2026 Monev Rusun.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Bengkulu, 2 Juni 2026 Rapat Koordinasi Persiapan Pembahasan Hasil Verifikasi BSPS Data Kemensos.	
	Jambi, 02 Juni 2026 Tanda Tangan Kontrak Reviu DED 08 – 09 Februari 2026.	
	Jambi & Bengkulu, 3 Juni 2026 Serah Terima Jabatan Pejabat Perbendaharaan.	
	Jambi & Bengkulu, 3 Juni 2026 Serah Terima Jabatan Pejabat Perbendaharaan.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 3 Juni 2026 Sosialisasi Budaya Sadar Risiko Keuangan.	
	Bengkulu, 4 Juni 2026 Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Calon BNBA BSPS di Dinas Perkim Provinsi Bengkulu.	
	Jambi, 9 Juni 2026 Pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).	
	Enggano, 10 – 13 Juni 2026 Verifikasi Calon Penerima Bantuan BSPS di Pulau Enggano.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 15 Juni 2026 Rapat Kolaborasi peningkatan kualitas Kawasan kumuh dan sanitasi di Provinsi Jambi Tahun 2026.	
	Jambi, 18 Juni 2026 Koordinasi Penguatan Program BSPS TA 2026, BP3KP Sumatera IV dan Dinas perumahan dan kawasan permukiman Bengkulu Utara.	
	Bengkulu, 18 Juni 2026 Rapat Koordinasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Usulan Kementerian Sosial TA 2026.	
	Jambi, 19 Juni 2026 Kegiatan Jalan Santai dalam mempererat kebersamaan antar pegawai, BP3KP Sumatera IV melaksanakan kegiatan GASKEN (Gerak Aktif Sehat, Kompak, dan Keren) yang diwujudkan melalui kegiatan jalan santai pada pagi hari untuk mendukung Zona Integritas.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 23 Juni 2026 Kegiatan Sosialisasi Budaya Sadar Risiko bersama BKN Provinsi Jambi.	
	Bengkulu selatan, 23 – 24 Juni 2026 Verifikasi Calon Penerima Bantuan BPS di Kabupaten Bengkulu Selatan.	
	Bengkulu tengah, 24 – 26 Juni 2026 Verifikasi Calon Penerima Bantuan BPS di Kabupaten Bengkulu Tengah.	
	Kaur, 25 – 26 Juni 2026 Verifikasi Calon Penerima Bantuan BPS di Kabupaten Kaur.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Jambi, 25 Juni 2026 Pembahasan Usulan CPB dengan Kemenbud.	
	Bengkulu tengah, 26 Juni 2026 Menghadiri Penyampaian Program Kerja Ibu Hj. Erna Sari Dewi, SE.,M.H., Komisi V DPR RI Dapil Bengkulu di Kantor Bupati Bengkulu Tengah.	
	Bengkulu, 29 Juni 2026 Pembekalan dan Peningkatan Kapasitas Koordinator Kota dan Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan dalam Penggunaan Aplikasi Go-PKP Kegiatan BSPS Provinsi Bengkulu TA 2026.	
	Jambi, 29 Juni 2026 Visitasi Inspeksi DPUTR Kota Jambi Pengajuan SLF Rusun.	

NO	KEGIATAN	DOKUMENTASI
	Bengkulu, 30 Juni 2026 Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pengusulan Calon Penerima Bantuan untuk mengatasi Permasalahan Tingkat Kelolosan Instruksi Verifikasi yang rendah di Provinsi Bengkulu.	

Lampiran 2. PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW II- DIPA Sekretariat Jenderal



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2026

Pihak Kedua



Didyk Choiroel
NIP. 197104161992011001

Jakarta, 10 April 2026

Pihak Pertama



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV			
SEKRETARIAT JENDERAL			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	1 Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2 Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan
		3 Jumlah Layanan Sarana Internal	42 unit

KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp	1.039.332.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	Rp	505.787.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	Rp	455.072.000,00
		Rp	2.000.191.000,00

Jakarta, 10 April 2026

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV



YENNI SOFYAN MORA

Lampiran 3. PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW II- DIPA Ditjen. Kawasan Permukiman



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2026

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026				
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV				
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN				
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2	Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	1800 Unit
Program Dukungan Manajemen				
3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1	Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2	Jumlah Data dan Informasi	1 Layanan
		3	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp		310.065.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	Rp		33.617.110.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	Rp		6.702.844.000,00
		Rp		40.630.019.000,00
Jakarta, Maret 2026				
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV		
 FITRAH NUR		 YENNI SOFYAN MORA		

Lampiran 4. PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW II- DIPA Ditjen. Perumahan Perdesaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PK REVISI 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2026

Pihak Kedua



Imran
NIP. 197310261993021001

Pihak Pertama



Yenni Sofyan Mora
NIP. 19810421 200812 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV			
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, dan pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen
		3 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
		3 Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	20 Unit
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	3600 Unit
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal Perumahan Perdesaan	1 Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp	302.560.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	Rp	26.334.632.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi	Rp	59.300.255.000,00
		Rp	88.937.447.000,00
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN		Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	
IMRAN		YENNI SOFYAN MORA	
		Jakarta, Maret 2026	

Lampiran 5. PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW II- DIPA Ditjen. Perumahan Perkotaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Maret 2026

Pihak Kedua

Sri Haryati
NIP. 197107071997032004

Pihak Pertama

Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV			
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendas Kebijakan
		2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2.	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendas Kebijakan
3.	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendas Kebijakan
4.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendas Kebijakan
		2. Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	12 Unit
5.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendas Kebijakan
		2. Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	900 Unit
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Layanan Umum	3 Layanan
		2. Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
		3. Jumlah Layanan BMN	1 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV	Rp	341.141.000,00
2.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Bengkulu	Rp	6.982.739.000,00
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Jambi	Rp	21.057.503.000,00
		Rp	28.381.383.000,00
Jakarta, 12 Maret 2026			
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV	
SRI HARYATI		YENNI SOFYAN MORA	

Lampiran 6. PK yang digunakan sebagai dasar penilaian Kinerja TW II- DIPA Ditjen. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Nurmala**
Jabatan : **Plt. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : **Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

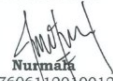
Pihak Kedua



Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Jakarta, 28 Januari 2026

Pihak Pertama



Nurmala
NIP. 197606112010012004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	3 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp 157,167,000.00

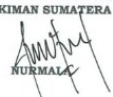
Jakarta, 28 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO



AZIS ANDRIANSYAH

Plt. KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV



NURMALA